

ANNUAL REPORT 2017

# LBH MASYARAKAT

BECAUSE EVERY HUMAN MATTERS





<b>03</b>	Catatan Direktur	<b>13</b>	Menggalang Partisipasi Publik	<b>21</b>	Dukungan Anda
<b>04</b>	Menjaga Demokrasi			<b>22</b>	Tim Kami
<b>06</b>	Kompleksitas Kerentanan Perempuan	<b>15</b>	Merawat Harapan		
<b>07</b>	Mengakhiri Stigma dan Diskriminasi	<b>16</b>	Menyebarkan Kemanusiaan		
<b>09</b>	Memperjuangkan Korban Eksekusi	<b>17</b>	Menghadirkan Keadilan		
<b>11</b>	Melawan Unfair Trial	<b>18</b>	Riset dan Analisis		
		<b>20</b>	Menjangkau Masyarakat		

# Catatan Direktur

Tidak terasa perjalanan LBH Masyarakat telah menginjak usia ke-10 tanggal 8 Desember 2017 kemarin. Sebagai salah satu pendiri, saya masih ingat betul ketika LBH Masyarakat didirikan pertama kali di Desember 2007, bersama para pendiri lainnya – Taufik Basari, Dhoho Ali Sastro, dan Yasmin Purba – kami masih belum memiliki apa-apa, baik itu sumber daya manusia maupun keuangan. Semuanya kami mulai dari nol. Sekian bulan berjalan, kami mulai merekrut sejumlah mahasiswi/a menjadi relawan. Para relawan generasi pertama inilah yang membangun pondasi LBH Masyarakat hingga berdiri kokoh sampai saat ini. Dua di antaranya masih bertahan hingga kini, Ajeng Larasati menjadi Koordinator Riset dan Kebijakan; dan Antonius Badar sebagai Koordinator Operasional – sebelumnya menjadi Koordinator Penanganan Kasus.

Seiring waktu berjalan, LBH Masyarakat mulai aktif di banyak isu hukum dan hak asasi manusia (HAM), dan kemudian menjadi pionir gerakan HAM untuk isu narkoba dan HIV yang sepuluh tahun lalu masih menjadi isu pinggir di antara organisasi hukum dan HAM. Ketika itu, kami merintis gerakan bantuan hukum dan mulai membangun paralegal komunitas di kelompok orang dengan HIV dan populasi yang terdampak oleh HIV seperti pemakai narkoba dan pekerja seks. Sepuluh tahun berselang, inisiatif tersebut sekarang telah diikuti oleh organisasi HIV dan pemakai narkoba di Indonesia. Kini banyak organisasi komunitas HIV dan pemakai narkoba mulai mengembangkan paralegal komunitas mereka sendiri. Menyaksikan perkembangan ini adalah kebanggaan tersendiri sebab gagasan bahwa komunitas harus mampu secara mandiri melakukan bantuan hukum dan advokasi adalah sebuah ide yang melandasi kelahiran LBH Masyarakat.

Di usianya yang ke-10 ini, tentu saja tantangan dan pekerjaan rumah LBH Masyarakat masih banyak. Ketidakadilan masih mendominasi wajah hukum Indonesia. Kemanusiaan terus tergerus. Kegelapan masih mendera setiap lini kehidupan kita, seolah kebaikan tak akan datang. Tapi LBH Masyarakat percaya bahwa kita harus terus bekerja bersama untuk mewujudkan keadilan dan merawat nilai-nilai kemanusiaan. Kita harus terus menumbuhkan harapan bahwa ‘memanusiakan manusia’ bukan lagi sekedar jargon, tetapi menjadi norma yang meresap dalam keseharian kita. Sebab, setiap manusia berharga – because every human matters.

Salam hormat,

**Ricky Gunawan**





MENJAGA HAK ASASI  
MANUSIA

# Hentikan Persekusi

LBH Masyarakat berkontribusi dalam menjaga demokrasi di Indonesia. Kami mengemukakan keras segala bentuk diskriminasi terhadap kelompok minoritas, termasuk dengan cara kriminalisasi dan persekusi. Di 2017, LBH Masyarakat menjadi kuasa hukum Komnas Perempuan untuk mencegah kriminalisasi terhadap teman-teman LGBT dan perluasan zina.

LBH Masyarakat bersama NGO terkait berhasil meyakinkan hakim bahwa kriminalisasi LGBT dan perluasan zina mengancam hak asasi manusia. Ditolaknya JR Pasal 284, 285, dan 292 KUHP ini juga secara langsung telah menjaga hak atas privasi, mencegah terjadinya persekusi terhadap kelompok minoritas gender dan perempuan, mencegah kemunduran program intervensi HIV, serta menjaga keberadaan pasal yang melindungi anak-anak dari hubungan seksual yang terjadi karena relasi kuasa orang dewasa.

# Kasus Lily

## POTRET KOMPLEKSITAS KERENTANA PEREMPUAN

Siapa sangka perjumpaannya dengan Steve membuat Lily (nama samaran) harus merasakan dinginnya ruang tahanan rutan Pondok Bambu. Lily, 27 tahun, orang tua tunggal bagi kedua anaknya, harus mendekam di Pondok Bambu karena membunuh bayi yang baru dia dilahirkan. Anak tersebut adalah hasil dari hubungannya dengan Steve. Sayangnya, Steve enggan bertanggungjawab. Ia melarikan diri. Lily, yang juga Orang Dengan HIV/AIDS (ODHA), kemudian terpuruk dan tertekan menanggung semuanya sendiri.

Pada bulan Januari, pukul 2 pagi dini hari, Lily melahirkan anak tersebut di kamar mandi di belakang rumah kontrakannya. Ia melakukan semuanya sendiri tanpa bantuan orang lain. Sesaat ia menatap wajah anaknya, Lily merasa bimbang. Ia memikirkan masa depan anaknya. "Bagaimana jika anakku tertular HIV? Bagaimana aku membiayai anak ini?", pikiran-pikiran ini mengelilingi kepalanya. Beberapa tahun terakhir Lily memang menganggur dan menggantungkan hidup kepada ayahnya, seorang pekerja harian lepas. Lily juga memikirkan gunjingan-gunjingan yang mungkin muncul karena anak ini lahir tanpa ayah. Karena tekanan psikologis yang besar itulah, ia memutuskan untuk membunuh bayinya dan membuangnya ke sungai di belakang rumahnya.

Jelang beberapa hari, warga sekitar menemukan bayi Lily di sungai tempat ia membuang anaknya. Kehebohan ini terdengar oleh pihak kepolisian. Merekapun memulai penyelidikan dan berhasil menangkap Lily. Atas perbuatan yang ia akui, Lily ditahan di Polres Jakarta Utara. Selama proses penyidikan berlangsung, salah satu teman Lily yang biasa mengantarkan ARV ke polres, melaporkan kasus Lily kepada LBH Masyarakat. Mengingat kasus ini sarat akan isu HIV, LBH Masyarakat memutuskan untuk menjadi kuasa hukum Lily.

Dalam dakwaan Jaksa Penuntut Umum, Lily diancam 18 tahun penjara. Selama proses pembuktian, LBH Masyarakat berusaha memberikan perspektif utuh kepada majelis hakim atas kasus ini.

Lily sesungguhnya adalah potret rentannya perempuan di mana dalam sebuah hubungan, masih ada relasi kuasa dan ketergantungan ekonomi yang jelas merugikan perempuan. Menghadirkan perspektif ini di pengadilan bukan perkara yang mudah, butuh beberapa saksi ahli untuk membantu majelis hakim memahami kondisi ini.

Harapan kami terjawab. Majelis hakim memberikan vonis tiga tahun penjara terhadap Lily. Jumlah ini jauh lebih kecil daripada dakwaan Jaksa. Meski demikian, kedua anak Lily harus menahan kerinduannya selama tiga tahun pula.

Kebiasaan dibuat atau dibentuk  
oleh manusia, tapi pada  
gilirannya kebiasaan dapat  
membentuk manusia.

» Murni Murni

MENGAKHIRI STIGMA DAN  
DISKRIMINASI

# Kelompok Minoritas

Di 2017, terjadi banyak penyerangan terhadap kelompok minoritas. Mereka sering diusir, dijauhkan, dan diasingkan hingga dipersekusi dan dimasukkan ke dalam bui.

LBH Masyarakat menghentikan stigma dan diskriminasi terhadap kelompok termarjinalkan dengan berbagai cara. LBH Masyarakat membuat modul hukum dan HAM bagi tenaga kesehatan. Dalam kegiatan ini, kami juga turun langsung menjadi fasilitator Pelatihan Hukum dan HAM di 17 Kota/Kabupaten di Indonesia. Tercatat ada 267 tenaga kesehatan yang mengikuti pelatihan ini.

Foto oleh:  
Astried Permata

Di isu HIV/AIDS, kami menyusun modul FGD bagi penegak hukum. Modul ini berisi perspektif HAM dalam penanggulangan HIV. LBH Masyarakat juga mengadakan pelatihan jurnalis berjudul "Jurnalis sebagai Aktor anti Stigma dan Diskriminasi." Kami mengundang Direktur Remotivi dan ahli tata bahasa untuk memberikan materi kepada 17 wartawan terpilih dalam memberitakan isu HIV/AIDS.

Di tingkat komunitas, LBH Masyarakat melakukan pelatihan hukum dan HAM bagi penjangkau. Sementara untuk isu LGBTIQ, kami membuat buku saku bagi LGBTIQ yang berhadapan dengan hukum. LBH Masyarakat menjalankan aktivitas ini sebagai respon maraknya persekusi dan kriminalisasi kepada teman-teman LGBTIQ.

Kami menyadari bahwa seluruh elemen masyarakat, baik tenaga kesehatan, aparat penegak hukum, dan jurnalis, perlu bergerak bersama LBH Masyarakat dalam rangka mengakhiri stigma dan diskriminasi terhadap kelompok minoritas di Indonesia.







Terlalu banyak darah yang terpaksa ditumpahkan, penderitaan yang harus ditahan, luka yang harus diobati. Selama 10 tahun berdiri kami tidak pernah lelah merawat harapan di tengah kegelisan ketidakmanusiaan yang terjadi, khususnya terkait eksekusi mati.

LBH Masyarakat terus memperjuangkan mereka yang terancam dipidana mati dan yang telah dieksekusi oleh negara. Pada Juli 2017, Ombudsman RI menyatakan bahwa telah terjadi pelanggaran hak asasi manusia dalam eksekusi mati jilid 3 yang dilakukan oleh Kejaksaan Agung RI.

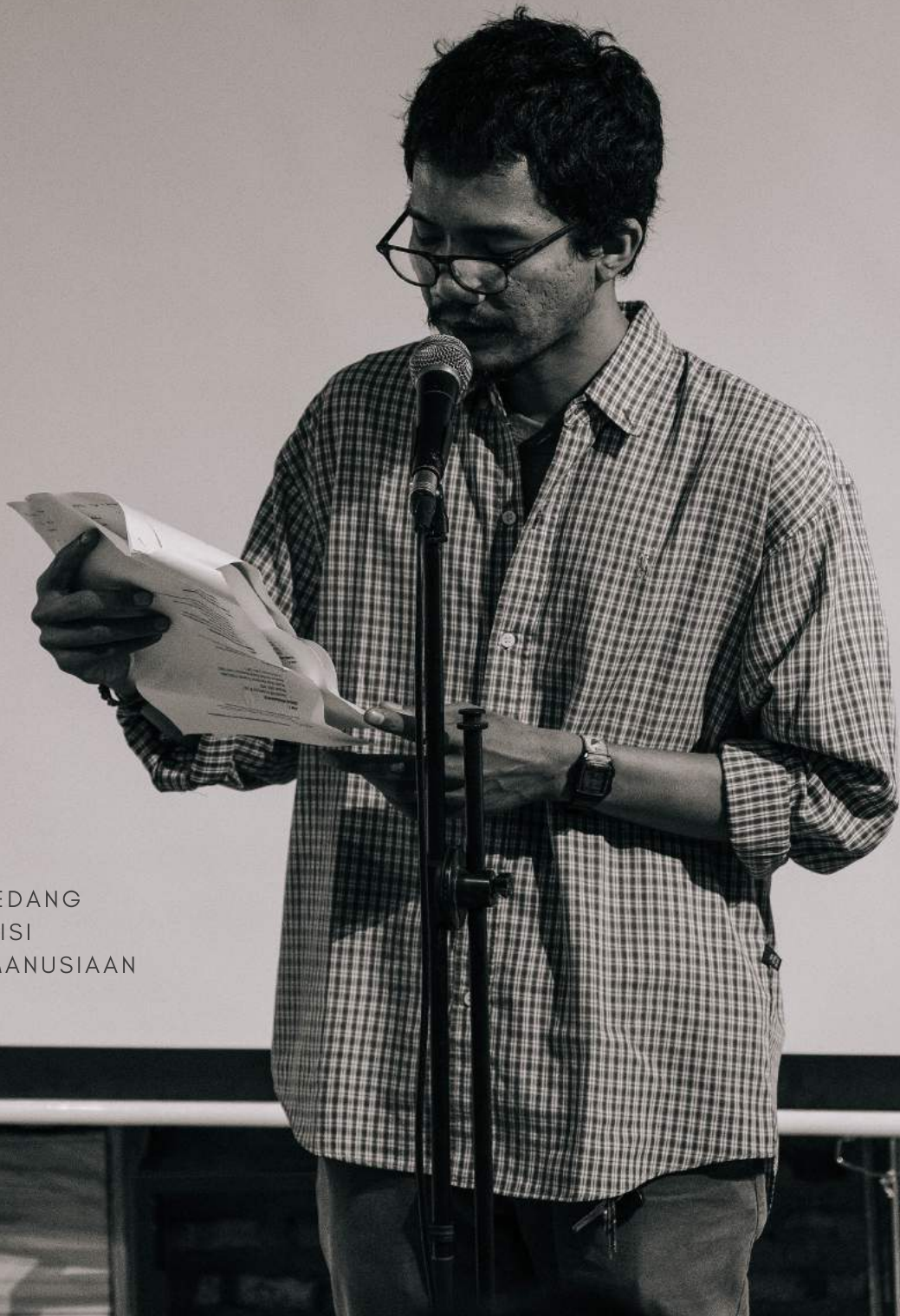
Ombudsman RI menjelaskan bahwa, Kejaksaan Agung RI di bawah pimpinan M Prasetyo telah melakukan maladministrasi saat eksekusi mati tanggal 29 Juni 2016 silam. Selain itu, Ombudsman juga menyatakan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat telah melakukan diskriminasi terhadap Jeff akibat penolakan PK yang diajukan. Putusan Ombudsman tertera lengkap dalam Hasil Akhir Pemeriksaan Laporan Nomor: 0793/LM/VIII/2016/JKT.

MEMPERJUANGKAN  
KORBAN EKSEKUSI

# Abolisi Hukuman Mati

# CELEBRATING LIFE

FOTO OLEH WILLY  
SYMPHONIA



BENNY SATRIO SEDANG  
MEMBACAKAN PUISI  
BERTEMAKAN KEMANUSIAAN  
DI ACARA ADFF





# Peradilan yang Adil

## MELAWAN UNFAIR TRIAL

Kasus ini berawal dari pecahnya tawuran antara kelompok bermotor (geng motor) dengan warga Jatiwaringin. Tawuran pada Februari 2017 itu berujung pada tewasnya salah seorang yang diduga anggota geng motor tersebut. Kepolisian pun bergerak. Setelah serangkaian penyelidikan, kepolisian menetapkan 8 orang sebagai tersangka. Selama proses pemeriksaan di kantor kepolisian, polisi mengintimidasi mereka, melakukan kekerasan fisik dan mengancam mereka. Karena tidak kuat menghadapi pelbagai bentuk penyiksaan tersebut, sekumpulan remaja ini memilih bungkam dan mengiyakan semua perkataan dari pihak kepolisian. Mereka pun terpaksa menandatangani Berita acara pemeriksaan (BAP). BAP ini berisi pengakuan telah melakukan penganiyaan yang mengakibatkan korban meninggal dunia. Sebuah kenyataan yang sesungguhnya tidak pernah remaja-remaja ini lakukan. Selepas itu, keluarga salah seorang terdakwa bernama Fira (bukan nama sebenarnya) menghubungi LBH Masyarakat. Mereka ingin perkara anaknya ditangani oleh LBH Masyarakat.

Setelah penandatanganan surat kuasa, LBH Masyarakat mulai menangani perkara ini di tahap pemeriksaan pengadilan. Bahkan, penuntut umum telah membacakan dakwaan terhadap Fira. Majelis hakim menolak eksepsi yang diajukan Fira beserta ketujuh terdakwa lainnya. Maka, pembuktian menjadi ajang pertempuran dalam perkara ini. Di dalam pembuktian tidak ada seorang saksi pun yang melihat remaja ini melakukan penganiayaan hingga korban meninggal dunia. Setali tiga uang dengan saksi, barang bukti arit yang ditunjukkan oleh penuntut umum juga tidak dapat menunjukkan bahwa Fira melakukan penganiayaan atau pembunuhan terhadap korban. Barang bukti Fira yang dihadirkan dalam persidangan ia dapatkan setelah proses interogasi yang sarat akan penyiksaan. Sebuah fakta dari tercerabutnya asas *non-self incrimination* dalam kaidah hukum yang harus dijunjung tinggi. Lebih fatal lagi, barang bukti yang dihadirkan penuntut umum tidak pernah diperiksa secara laboratoris.

Adapun selama persidangan Fira dan ketujuh remaja lainnya mengaku bahwa aparat kepolisian telah menyiksa mereka. Berdasarkan keterangan para terdakwa tersebut, majelis hakim pun memanggil saksi verbalisan dari kepolisian yang diduga melakukan penyiksaan. Namun, pihak kepolisian menolak telah melakukan penyiksaan terhadap Fira dan remaja lainnya.

Dalam nota pembelaan, LBH Masyarakat menyampaikan seluruh fakta hukum yang ada di persidangan. Termasuk penyiksaan dan kriminalisasi yang dialami oleh Fira dan tujuh remaja lainnya. Pada 2017, Pengadilan Negeri Jakarta Timur akhirnya memutuskan bebas klien kami Fira dan ketujuh remaja lainnya. Dalam pertimbangan putusan, majelis hakim berpendapat bahwa tidak ada saksi dan hal lainnya yang dapat menerangkan Fira dan tujuh lainnya menganiaya dan mengakibatkan korban meninggal dunia. Dalam amar putusannya, majelis hakim menyatakan Fira dan terdakwa lainnya tidak terbukti secara sah melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan penuntut umum.

Meski sempat bermalam di rutan paska putusan, akhirnya Fira bisa pulang ke rumah dan bertemu orang tuanya.





# KAMPANYE HAM

## MENGGALANG PARTISIPASI PUBLIK

Pada April 2017, Indonesia dihebohkan dengan kasus suami yang rela melawan hukum untuk menyembuhkan istrinya yang sakit. Sang suami bernama Fidelis. BNNK Sanggau menangkap Fidelis atas aduannya sendiri, menanam ganja di halaman rumahnya. Bukan izin yang ia dapat, atau akses kesehatan untuk istrinya, BNNK justru memasukkan Fidelis ke jeruji besi.

Melihat ketidakadilan ini, LBH Masyarakat melakukan sejumlah advokasi, di antaranya memberikan konsultasi kepada keluarga Fidelis terkait jeratan hukum yang ia alami, mengadakan konferensi pers untuk mengungkapkan kasus yang sebenarnya terjadi kepada masyarakat, dan melakukan kampanye guna mengajak masyarakat mendesak aparat penegak hukum untuk melihat kasus ini sebagai kasus kemanusiaan.

Advokasi ini dilakukan mulai dari proses penangkapan hingga putusan pengadilan. Hasilnya 47 artikel berita memuat narasi LBH Masyarakat memandangi kasus Fidelis, 8 artikel mengiringi putusan, dan puluhan orang terlibat dalam kampanye #SaveFidelis baik offline maupun online.

Selain kasus Fidelis, LBH Masyarakat juga mengadakan berbagai kampanye yang melibatkan masyarakat umum, di antaranya peringatan Hari AIDS Sedunia, Hari Anti Hukuman Mati Sedunia, dan Hari Hak Asasi Manusia Sedunia.

"We must accept finite disappointment,  
but never lost infinite hope."

- MARTIN LUTHER KING JR

Pada Hari AIDS Sedunia, LBH Masyarakat membuat video pendek mengenai persepsi masyarakat sebelum dan sesudah mengetahui cara penularan HIV/AIDS. Kami merekam 5 orang umum dengan latar belakang yang berbeda, dan menanyakan pendapat mereka terhadap orang dengan HIV/AIDS. Empat di antaranya mengaku tidak mau melakukan kontak sosial dengan ODHA. Namun, setelah kami memberi informasi terkait cara penularan HIV/AIDS, tiga orang di antaranya mengaku mau untuk melakukan kontak sosial.

Video yang diunggah di sosial media LBH Masyarakat ini, ditonton setidaknya oleh 650 orang.

Untuk menyambut Hari Anti Hukuman Mati Sedunia, LBH Masyarakat mengadakan festival kemanusiaan "A Day for Forever" yang dimeriahkan oleh beberapa seniman termasuk penyair, musisi, dan komedian. Kami juga mengadakan pameran memorabilia karya terpidana mati. Acara ini dihadiri oleh lebih dari 200 orang.

Sementara itu di Hari HAM, LBH Masyarakat membuka diskusi mengenai hak asasi manusia di Indonesia. Diskusi yang berformat live di instagram ini ditonton oleh lebih dari 150 orang.



# Merawat Harapan



---

"HOPE BEGINS IN THE DARK, THE STUBBORN HOPE THAT IF YOU JUST SHOW UP AND TRY TO DO THE RIGHT THING, THE DAWN WILL COME."

- Anne Lamott

# MENYEBARKAN KEMANUSIAAN

## MEMBERIKAN PEMAHAMAN HAK ASASI MANUSIA

LBH Masyarakat menyadari bahwa terciptanya Indonesia yang ramah manusia bukan hanya menjadi tanggungjawab kami, tapi kita. Untuk itu, LBH Masyarakat rajin melatih beberapa kelompok masyarakat mengenai konsep dan praktik hak asasi manusia. Adapun pelatihan yang kami adakan yakni Living The Human Rights (LIGHTS). Lebih dari 250 mahasiswa di seluruh Indonesia mendaftar pelatihan ini. Terpilih 20 mahasiswa yang lolos seleksi dan mengikuti pelatihan selama dua minggu ini. Lima di antaranya merupakan pemenang beasiswa yang kami tawarkan untuk mahasiswa yang berasal dari luar Pulau Jawa.

Kami juga melakukan penyuluhan hukum kepada 641 tahanan di Jakarta khususnya di Rutan Salemba, Rutan Pondok Bambu, dan Rutan Cipinang. Penyuluhan rutin ini dilakukan guna memberikan pemahaman mengenai proses hukum dan hak tahanan selama menjalani proses peradilan.

Selain itu, kami juga melakukan pelatihan dan pengasahan skill terhadap 15 orang paralegal LBH Masyarakat. Di sana, kami berbagi cerita mengenai pendampingan hukum yang dikerjakan teman-teman paralegal, serta melakukan pelatihan tambahan terkait situasi hak asasi manusia terkini.

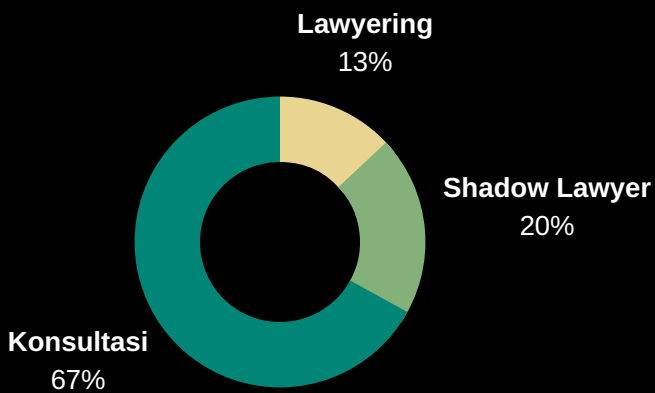
Sementara untuk komunitas pengguna narkoba, LBH Masyarakat melakukan pelatihan kampanye. Di sana kami memutar film pendek mengenai kebijakan narkoba di bawah Jokowi. Setelah itu, kami mengajarkan bagaimana melakukan advokasi melalui film. Pelatihan ini dilaksanakan di dua kota, yakni Bogor dan Lombok.

Kami juga menjadi fasilitator pelatihan relawan Komnas Perempuan. Ada 15 relawan yang LBH Masyarakat latih mengenai hukum beracara dan upaya paksa.



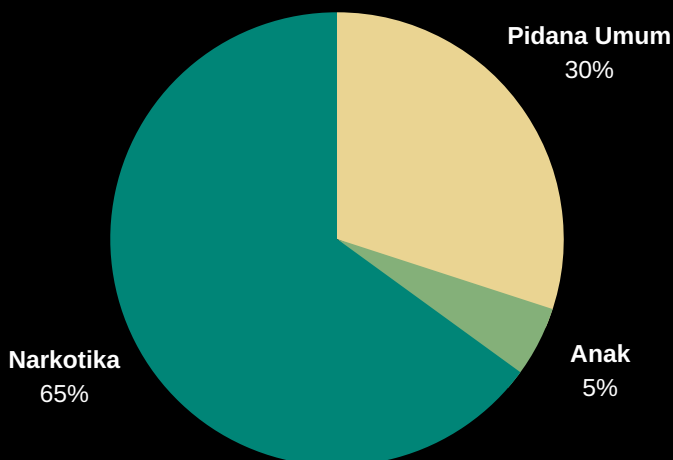
# Menghadirkan Keadilan

## JENIS BANTUAN HUKUM



Di 2017, LBH Masyarakat menangani 156 kasus. Jumlah ini naik 27% dari 2016. Pada dasarnya, kami memberikan tiga jenis bantuan hukum terhadap kasus yang datang, yakni lawyering atau pendampingan hukum, shadow lawyer, dan konsultasi. Biasanya mereka yang tidak kami dampingi adalah kasus yang telah memiliki pengacara atau OBH. Sementara konsultasi dilakukan kepada kasus yang bukan prioritas LBH Masyarakat. Kami akan merujuk kasus-kasus tersebut ke lembaga lain yang punya isu sejenis.

## JENIS PIDANA UNTUK LAWYERING



## KASUS HUKUMAN MATI



LBH Masyarakat menyadari bahwa diperlukan analisis mendalam untuk mengetahui akar masalah dari pelanggaran hak asasi manusia yang terjadi di Indonesia. Untuk itu kami melakukan sejumlah penelitian. Penelitian ini juga digunakan sebagai dasar advokasi untuk mengubah kebijakan yang lebih humanis sekaligus mengedukasi masyarakat dan menyediakan studi dasar bagi mereka, khususnya mahasiswa, yang tertarik mempelajari hak asasi manusia beserta perkembangannya dan fenomenanya.

Berikut adalah 7 penelitian yang LBH Masyarakat kerjakan dalam setahun terakhir. **Pertama**, Dampak Kerja Paralegal Paralegal terhadap Akses Keadilan dan Kesehatan. Data yang kami peroleh dalam penelitian ini dilakukan melalui pengisian kuesioner, wawancara mendalam, dan juga FGD. Diharapkan penelitian ini mampu memperlihatkan dampak positif kerja paralegal terhadap komunitasnya, dan juga memperbaiki program paralegal yang telah ada.

**Kedua**, bekerja sama dengan International Drugs Policy Consortium (IDPC), No Box Philippines, dan Ozone Foundation, LBH Masyarakat mengadakan penelitian mengenai perempuan terpidana narkoba.

# Riset dan Analisis

Penelitian yang dilakukan di tiga negara ini (Thailand, Indonesia, Filipina) mencoba mengetahui data mengenai perempuan terpidana narkoba pada masing-masing negara, mengidentifikasi latar belakang sosial ekonomi perempuan terpidana narkoba, melihat dampak sosial dan ekonomi pemenjaraan, dan membuat panduan bagi pemerintah dan aparat penegak hukum dalam penanganan kasus perempuan yang melakukan tindak pidana narkoba. Di Indonesia, penelitian dilakukan terhadap empat lapis perempuan di Indonesia.

**Ketiga**, untuk mempermudah pengguna narkoba mengakses rehabilitasi, LBH Masyarakat bekerjasama dengan Mainline mengunjungi beberapa lembaga rehabilitasi di bawah Kementerian Kesehatan, Kementerian Sosial, dan Badan Narkotika Nasional (BNN) untuk memetakan dan mencari tahu berbagai pola dan metode yang digunakan dalam rehabilitasi. Diharapkan pemetaan ini dapat membantu pengguna narkoba memilih rehabilitasi yang mana dengan metode seperti apa yang cocok dengan kebutuhan mereka.

**Keempat**, Cornell University mengadakan penelitian mengenai perempuan terpidana mati di dunia. LBH Masyarakat dipercaya untuk melakukan penelitian tersebut di Indonesia. Selama periode Juli - September 2017, LBH Masyarakat melakukan penelusuran dokumentasi perempuan terpidana mati dan mewawancarai 3 perempuan terpidana mati yang berada di Jakarta dan Medan.

Penelitian ini juga dipresentasikan dalam sebuah forum di Budapest.

**Kelima**, LBH Masyarakat memantau dan mendokumentasi pelanggaran hak asasi manusia yang diliput oleh media arus utama di Indonesia. Adapun tujuh serial dokumentasi terkait isu yang dikerjakan meliputi Stigma dan Diskriminasi terhadap LGBT, Stigma dan Diskriminasi dalam isu HIV, Kematian dalam Tahanan, Pelaksanaan Qanun dan Jinayat, Pemenuhan Hak Orang dengan Gangguan Jiwa, Penanganan Kasus Narkotika Skala Besar, dan Peredaran Narkotika dalam Lapas.

**Keenam**, LBH Masyarakat meluncurkan laporan Dokumentasi Pelanggaran HAM yang dilakukan selama periode Oktober 2016 hingga Agustus 2017. Setidaknya ditemukan 387 kasus pelanggaran hak yang terjadi pada kelompok ODHA, pengguna narkotika, LSL, pekerja seks dan pasien TB. **Terakhir**, tepat pada hari yang sama diseminasi juga dilakukan terhadap Kajian Hukum dan Kebijakan HIV di Indonesia yang dilakukan di 6 kabupaten/kota.



# Menjangkau Masyarakat

Untuk mempermudah masyarakat mengakses informasi mengenai situasi hak asasi manusia terkini, LBH Masyarakat melakukan publikasi dan advokasi melalui sosial media.

Kebutuhan yang terjawab ini bisa dilihat dari jumlah masyarakat yang mengikuti LBH Masyarakat di sosial media yang terus meningkat.

Di ujung tahun 2017, jumlah followers LBH Masyarakat di Facebook mencapai lebih dari 3.400. Artinya, dalam setahun ada 900 orang baru yang mengikuti kami di Facebook. Sedangkan Twitter berdiri di angka 1.500. Jumlah ini naik 69,3% dari tahun sebelumnya. Sementara itu, di 2017, LBH Masyarakat juga membuka akun LINE dan Instagram. Kedua akun ini dibuat semata-mata untuk menyesuaikan pola baru yang dilakukan masyarakat dalam mengakses informasi. Di tahun pertamanya, akun Line LBH Masyarakat diikuti oleh lebih dari 170 orang. Sementara, Instagram berada di angka 780 followers.



Informasi situasi hak asasi manusia juga kami sebarakan melalui media arus utama dan alternatif dengan bantuan teman-teman pekerja media. Sepanjang 2017, tercatat ada **267** artikel Bahasa Indonesia memuat pandangan LBH Masyarakat, **13** di antaranya adalah media alternatif dan forum. Sedangkan dalam tataran internasional, tercatat lebih dari **67** artikel berita memuat komentar LBH Masyarakat di dalamnya.



# DUKUNGAN ANDA

10 tahun LBH Masyarakat mengabdikan kepada masyarakat, berusaha sekuat tenaga membela mereka yang terlanggar haknya, melawan ketidakadilan, merawat harapan agar tercipta Indonesia yang ramah manusia.

Sedikit banyak warna kemanusiaan yang kami torehkan adalah berkat bantuan dan dukungan dari berbagai pihak yang telah terlibat dan mendukung kerja-kerja LBH Masyarakat.

Kami mengucapkan terima kasih kepada pihak-pihak, organisasi dan individu-individu yang tidak dapat kami sebutkan satu per satu yang telah mendukung kerja-kerja kami.



# BECAUSE EVERY HUMANS MATTERS

LBH MASYARAKAT MENJEMBATANI KEADILAN BAGI MEREKA YANG DIPANDANG TAK SAMA. KAMI PERCAYA DALAM KETIDAKADILAN KEMANUSIAAN KALAH. BERSAMA MARI BERJUANG MELAWAN KETIDAKADILAN, MENJAGA KEMANUSIAAN, MENUMBUHKAN HARAPAN.

**LIHAT TIM KAMI**

## RICKY GUNAWAN

### DIREKTUR

Menyelesaikan MA Human Rights in Theory and Practice di University of Essex, di Inggris. Ricky terlibat aktif dalam diskusi dan advokasi hak asasi manusia di tingkat nasional maupun internasional. Di 2017, Ricky dinobatkan sebagai salah satu aktivis narkoba yang wajahnya diabadikan dalam bentuk lukisan di Museum of Drug Policy di London. Di tahun yang sama Ricky juga terpilih sebagai pemenang British Council Alumni Awards dalam kategori *social impact* karena dedikasinya di isu hak asasi manusia.

## AJENG LARASATI

### KOORDINATOR RISET DAN KEBIJAKAN

Di 2017, Ajeng dipercaya menjadi anggota tim evaluasi kebijakan HIV di Indonesia. Ajeng, bersama dengan UNAIDS Regional Office bertanggung jawab untuk melakukan evaluasi terhadap situasi pemenuhan hukum dan HAM dalam kebijakan HIV. Ajeng juga terlibat sebagai ahli terkait pembuatan Naskah Akademik Peraturan Daerah Kota Tangerang Selatan tentang Penanggulangan HIV dan AIDS. Ajeng juga menghadiri Universal Periodic Review terhadap Indonesia di Geneva.

## MUHAMMAD AFIF

### KOORDINATOR PENANGANAN KASUS

Sebagai Koordinator Advokasi Kasus, Afif memimpin penanganan kasus-kasus strategis LBH Masyarakat, termasuk kasus hukuman mati. Di 2017, Afif berhasil memenangkan aduan LBH Masyarakat terkait pelanggaran hak asasi manusia yang dilakukan oleh Kejaksaan Agung RI dan Pengadilan Negeri Tinggi terhadap terpidana mati saat eksekusi mati Jilid 3 berlangsung. Afif juga berhasil mencegah kriminalisasi terhadap LGBT saat Judicial Review MK melalui perannya sebagai pengacara Komnas Perempuan.

## ANTONIUS BADAR

### KOORDINATOR OPERASIONAL

Koordinator sekaligus pengacara publik LBH Masyarakat ini baru saja melakukan investigasi terhadap salah satu klien terpidana mati yang kami tangani. Di samping kesibukannya memimpin tim operasional, Badar juga menangani beberapa kasus narkoba dan anak.



## DOMINGGUS CHRISTIAN

PENGACARA PUBLIK

Pengacara publik LBH Masyarakat ini menangani beberapa kasus penyiksaan dan hukuman mati. Ia juga terlibat dalam koalisi masyarakat sipil untuk reformasi hukum pidana. Ia bersama Ma'ruf membebaskan klien kami dari fitnah hukum.

## NAILA RIZQI

PENGACARA PUBLIK

Lulusan Universitas Jember ini aktif dalam berbagai advokasi khususnya di isu LGBT dan Anak. Di 2017, Naila berhasil mencegah kriminalisasi terhadap LGBT melalui perannya sebagai kuasa hukum Komnas Perempuan saat Judicial Review di Mahkamah Konstitusi. Naila juga menjadi salah satu pembicara di Harm Reduction International 2017 di Montreal, Canada.

## YOSUA OCTAVIAN

PENGACARA PUBLIK

Yosua menyelesaikan pendidikan hukumnya di Universitas Kristen Indonesia. Di LBH Masyarakat, selain rajin melakukan penyuluhan, dalam setahun ia menangani berbagai kasus narkoba dan empat kasus hukuman mati.

## MA'RUF BAJAMMAL

PENGACARA PUBLIK

Lulusan Fakultas Hukum Universitas Trisakti ini menangani kasus-kasus narkoba dan pidana umum lainnya. Di tahun pertama di LBH Masyarakat, Ma'ruf berhasil membebaskan salah satu klien kami dari jerat pidana.

## RIKI EFFENDI

PENGACARA PUBLIK

Mengawali pengabdianya sebagai Paralegal LBH Masyarakat, kini Riki menangani banyak kasus narkoba dan anak. Dalam setahun ia menangani lebih dari 15 kasus. Selain itu, Riki juga membuka akses kesehatan bagi teman-teman pengguna narkoba.



## ALBERT WIRYA

### PENELITI

Albert memimpin empat penelitian sekaligus yang LBH Masyarakat kerjakan di 2017. Ia juga terlibat dalam advokasi hak asasi manusia di isu kesehatan jiwa. Di tahun yang sama, Albert juga menangani beberapa kasus HIV/AIDS. Ia berhasil mengadvokasi salah satu kasus yang menimpa anak dengan HIV/AIDS.

## FUJI AOTARI

### STAF PROGRAM

Fuji mengelola berbagai program yang dilakukan LBH Masyarakat. Di 2017, Fuji mengelola dua program besar dan menjalankan berbagai kajian serta advokasi terkait isu HIV/AIDS, salah satunya dokumentasi pelanggaran HAM terhadap populasi kunci yang dilakukan di 17 kota.

## ARINTA DEA

### ANALIS JENDER

Di 2017, Arinta memimpin dua penelitian yang dikerjakan LBH Masyarakat, yakni mengenai perempuan terpidana mati di Indonesia dan perempuan tindak pidana narkoba. Arinta mempresentasikan salah satu hasil penelitiannya di workshop *Understanding the Gendered Impacts of Drugs, Drug Policy and Drug Policy Enforcement* yang diselenggarakan di Budapest.

## YOHAN MISERO

### ANALIS KEBIJAKAN NARKOTIKA

Selama setahun kemarin Yohan aktif memantau perkembangan kebijakan narkoba di Indonesia. Ia terlibat dalam berbagai advokasi kebijakan baik di tingkat provinsi maupun nasional. Selain itu, ia dipercaya menjadi narasumber di sejumlah media perihal kebijakan narkoba. Dalam setahun ia menjadi narasumber di empat program TV yang berbeda. Ada lebih dari 90 artikel dalam dan luar negeri yang mengutip argumen Yohan mengenai narkoba di Indonesia.

## ALI MUDOPAR

### KEPALA RUMAH TANGGA

Dopar membantu pelaksanaan operasional program LBH Masyarakat, di antaranya LIGHTS 2017 dan konferensi pers yang diadakan di kantor LBH Masyarakat.

## HERLINA

### ADMINISTRATOR

Tidak hanya mengerjakan administrasi LBH Masyarakat, Herlina juga terlibat dalam berbagai kegiatan kampanye menentang kekerasan terhadap perempuan. Ia aktif dalam kampanye One Billion Rising dan juga Women's March Jakarta.

## DEDE KHAERUDDIN

### STAF KEUANGAN

Dede mengatur segala proses keuangan LBH Masyarakat. Ia bersama kedua staf internal lainnya juga menyelesaikan audit keuangan LBH Masyarakat. Di tahun 2017, Dede juga berhasil menyelesaikan studinya di bidang akuntansi.

## ASTRIED PERMATA

STAF KOMUNIKASI

Astried menjalankan beberapa aktivitas komunikasi LBH Masyarakat, di antaranya media sosial, kampanye, dan menjalin hubungan dengan media. Dalam setahun ia menjalankan empat kegiatan kampanye yang dilakukan LBH Masyarakat.

## GILBERT LIANTO

STAF FUNDRAISING

Selain bertanggung jawab untuk mengembangkan penggalangan dana publik untuk LBH Masyarakat, Gilbert terlibat dalam beberapa kegiatan kampanye berkaitan dengan kesetaraan dan keberagaman jender seperti One Billion Rising dan Women's March Jakarta.



**PERKUMPULAN**  
**LEMBAGA BANTUAN HUKUM**  
**MASYARAKAT**

## KONTAK

WEBSITE : [www.lbhmasyarakat.org](http://www.lbhmasyarakat.org)

FACEBOOK: @LBHM.id

EMAIL : [contact@lbhmasyarakat.org](mailto:contact@lbhmasyarakat.org)

TELP : (021) 837 897 66



PERKUMPULAN  
LEMBAGA BANTUAN HUKUM  
MASYARAKAT

[www.lbh masyarakat.org](http://www.lbh masyarakat.org)

Jalan Tebet Timur Dalam VI E No. 3, Tebet, Jakarta Selatan,  
12820, Indonesia

Foto sampul depan oleh Willy Symhponia